

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEKUTUAN KOMANDITER
YANG MERUGIKAN PIHAK KETIGA**

Nama : Mega Puspa Kusumojati
Jurusan/Program Studi : Hukum/ Magister Kenotariatan
Pembimbing : Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

ABSTRAK

Bahwa Persekutuan komanditer atau yang dikenal dengan CV (*Commanditaire Vennootschap*) merupakan Pengaturan persekutuan komanditer terdapat didalam Kitab Undang – Undang Dagang (KUHD) hanya pada tiga Pasal 19, 20 dan 21. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) UUJN-P menentukan bahwa akta Notaris yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang - undang ini. Kelalaian atau Kesalahan Notaris dalam membuat akta dapat dibuktikan maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dipertanggungjawaban baik secara Pidana dan Perdata. Permasalahan yaitu perbuatan melawan hukum atas kelalaian Notaris akibat ketidakhati – hatian Notaris dalam membuat akta perubahan anggaran dasar yang merupakan sebab utama pembatalan akta Notaris tersebut melalui putusan pengadilan. Pembatalan akta Notaris juga dapat disebabkan atas gugatan dari salah satu permintaan pihak Persekutuan komanditer dan Pihak Ketiga dalam membuat Akta Perubahan Anggaran dasar. Seperti kasus Putusan Notaris Musdalifah, S.H, M.Kn yang terkait kasus Pidana di Pengadilan Negeri Surabaya yang terdaftar dengan Nomor 2370/Pid.B/2021/PN.Sby terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana keterangan Palsu atas permintaan salah satu pihak perusahaan komanditer tanpa adanya persetujuan seluruh para persero tidak dapat dipergunakan sebagai akta otentik yang mengikat. Jenis Penelitian ini masuk kategori penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan Undang – Undang, Pendekatan Kasus, Pendekatan Konseptual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akta Anggaran Dasar Persekutuan Komanditer tersebut dibatalkan dan Notaris bertanggung jawab mengganti rugi terhadap pihak ketiga sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Kata Kunci : Notaris, Akta Perubahan Anggaran Dasar, Persekutuan Komanditer, Pihak Ketiga.

**PONSIBILITIES OF NOTARY IN MAKING DEEDS OF AMENDMENT
TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF COMMANDITAIRE
VENNOOTSCHAP (CV) COMPANIES CAUSING LOSSES TO THE
THIRD PARTIES**

Name : Mega Puspa Kusumojati
Departement/Study Program : Master of Notary
Contributor : Dr. Ghansham Anand, S.H.,M.Kn.

ABSTRACT

A limited partnership or CV (Commanditaire Vennootschap) is an agreement contained in the Commercial Code (KUHD) in three articles, namely Articles 19, 20 and 21. Article 1 Paragraph (7) UUJN-P stipulates that a Notary Deed made by or before a notary is according to the form and procedure stipulated in this law. If the notary's negligence or mistake in making the deed can be proven, the notary can be held accountable both criminally and civilly. The problem of this study is the unlawful act of notary negligence due to carelessness in making the deed of amendment to the articles of association as the main reason for canceling the notary deed through a court decision. It can be caused by a lawsuit filed by the companies and third parties in making the Deed of Amendment to the Articles of Association. It is the same with the decision to Notary Musdalifah, S.H, M.Kn related to a criminal case at the Surabaya District Court Number 2370/Pid.B/2021/PN.Sby who was proven legally and convincingly committed the crime of false information at the request of one of the companies without the consent of all the shareholders so it cannot be used as an authentic binding deed. This normative juridical legal research used statutory, case and conceptual approaches. In conclusion, the deed of the Articles of Association of the company is canceled and the Notary is responsible for compensating the third parties according to the provisions of Article 1365 of the Civil Code.

Keywords : *Notary, Deed of Amendment to Articles of Association, Limited Partnership, Third Parties.*